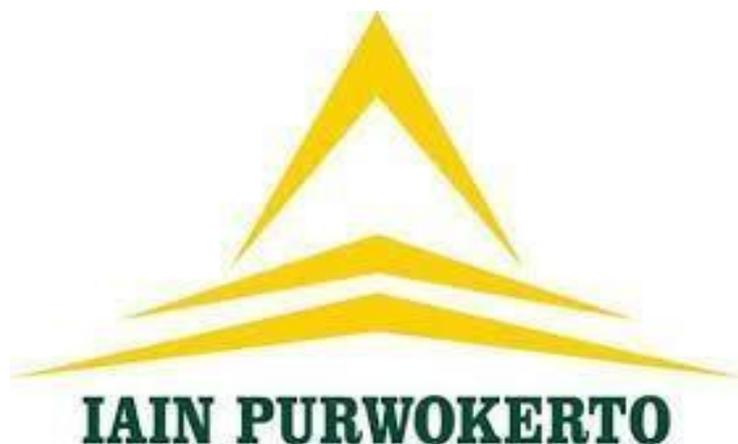


**IMPLEMENTASI PROGRAM MODERASI BERAGAMA DI  
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANYUMAS PADA  
LINGKUNGAN SEKOLAH**



**TESIS**

Disusun dan diajukan kepada Pascasarjana  
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Memperoleh Gelar Magister Pendidikan (M.Pd.)

**MUHAMMAD NUR ROFIK**

**181776021**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM  
PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
2021**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Sejarah masa lalu menyebutkan bahwa urusan agama di Indonesia pada zaman dahulu dimasukkan kedalam urusan pendidikan. Namun seiring berjalannya waktu problematika keagamaan yang muncul semakin hari semakin kompleks. Atas dasar itulah kemudian pemerintahan Indonesia membentuk sebuah lembaga yang khusus menangani urusan keagamaan dan segala permasalahannya dengan memunculkan lembaga Kementerian Agama Republik Indonesia (KEMENAG). Selain itu, lahirnya lembaga ini juga dilatarbelakangi oleh sering adanya perdebatan-perdebatan yang terjadi antara umat muslim dan umat kristen di Indonesia terlebih masalah hak-hak peribadatan pada saat itu.

Perkembangan zaman dari waktu ke waktu menjadikan Kementerian Agama menjadi sebuah lembaga yang juga menangani problematika pendidikan di lingkup madrasah maupun sekolah. Sekolah menjadi salah satu tempat laboratorium sebuah pendidikan karena di dalamnya terjadi sebuah proses keilmuan yakni transfer ilmu yang diberikan guru kepada murid.

Adapun jenjang madrasah dan sekolah yang dimaksud adalah sama antara sekolah dan madrasah namun berbeda istilah saja, yaitu:

1. Madrasah Ibtidaiyah (MI) setingkat dengan Sekolah Dasar (SD)
2. Madrasah Tsanawiyah (MTs) setingkat dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP)
3. Madrasah Aliyah (MA) setingkat dengan Sekolah Menengah Atas (SMA).<sup>1</sup>

Dalam ranah pendidikan Kementerian Agama memang lebih terkhusus kepada lingkup madrasah, sedangkan sekolah dinaungi oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek). Namun bukan berarti Kementerian Agama tidak berkaitan dengan sekolah umum, karena dalam sekolah umum ada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) yang dinaungi oleh Kemenag. Maka persoalan-persoalan keagamaan yang ada di sekolah umum juga menjadi tanggung jawab Kemenag yang dalam hal ini ada seksi/bagian tersendiri yang bernama seksi Pendidikan Agama Islam (PAI).

---

<sup>1</sup> Ridwan nasir, *Mencari Tipologi Format Pendidikan Ideal*, (Jogjakarta: Pustaka Pelajar,2010), 90-96

Indonesia merupakan negara yang memiliki penduduk muslim terbanyak di dunia dan tentu dengan demikian Indonesia menjadi sorotan penting dalam hal moderasi Islam. Moderasi itu sendiri merupakan ajaran inti agama Islam. Islam yang moderat adalah paham keagamaan yang sangat relevan dalam konteks keberagaman dalam segala aspek, baik agama, adat istiadat, suku maupun bangsa itu sendiri.<sup>2</sup> Oleh karenanya pemahaman tentang moderasi beragama harus dipahami secara kontekstual bukan secara tekstual, artinya bahwa moderasi dalam beragama di Indonesia bukan Indonesia yang dimoderatkan, tetapi cara pemahaman dalam beragama yang harus moderat/toleran karena Indonesia memiliki banyak sekali kultur, budaya dan adat-istiadat yang tentu sangat perlu dijaga.

Radikalisme keagamaan yang berujung pada konflik tentu sepantasnya tidak terjadi di Indonesia. Munculnya radikalisme keagamaan ini juga disebabkan karena adanya perbedaan keyakinan dan upaya memenangkan kontrol terhadap definisi kebenaran dalam agama. misalnya adalah ketika agama didefinisikan berbeda dengan definisi pemeluk agama lainnya akan memunculkan konflik yang bersifat vertikal maupun horizontal.<sup>3</sup>

Hal semacam ini diduga berasal dari kemajuan pola pikir dan sudut pandang masyarakat tentang perkara agama yang semakin kompleks. Pola pemikiran tentang keagamaan adalah hal serius yang harus selalu diperhatikan karena dari pemikiran itulah yang menyebabkan kesalahpahaman dalam menangkap sebuah ajaran Islam yang sesuai dengan Al-Qur'an maupun Al-Hadits. Banyak dari masyarakat pada saat ini yang fanatik terhadap keyakinan model paham agama yang diyakininya. Inilah yang kemudian dikhawatirkan menjadikan sifat intoleran antar paham keagamaan yang lain.

Adanya heterogenitas yang ada dalam bangsa Indonesia ini bisa disebut juga sunnatullah yang Allah berikan. Namun dalam perbedaan-perbedaan yang ada Allah tetap menjadikan satu kerangka kesatuan umat (*Ummatan Wahidah*).<sup>4</sup> Maka dari itu dalam kehidupan nyata sebagai umat Islam kita dituntut untuk menjadi umat yang moderat (*Ummatan Wasathiyyah*). Namun kekhawatiran yang

---

<sup>2</sup> Dawing, D, *Mengusung Moderasi Islam di tengah Masyarakat Multikultural*, (2017: *Rausyan Fikr: Jurnal Studi Ilmu Ushuluddin Dan Filsafat*, 13(2)), 225–255

<sup>3</sup> Andy Darmawan, *Dialektika Islam dan Multikulturalisme di Indonesia: Ikhtiar Mengurai Akar Konflik*, (Yogyakarta: Kurnia kalam semesta, 2009), 61

<sup>4</sup> Ali, Z. . *Pendidikan Agama Islam*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 101

muncul adalah paham fanatisme yang bermunculan dari masyarakat yang tidak bisa diarahkan. Paham tersebut yang kemudian memasuki lingkungan pendidikan yang dibawa oleh pendidik maupun peserta didik. Kemudian yang perlu diwaspadai adalah hal semacam ini bisa membuat sebuah keretakan dalam intern Agama Islam itu sendiri.

Semua orang pasti tahu bahwa negara Indonesia adalah negara yang memiliki semboyan *Bhinneka Tunggal Ika* dan menjadikan Pancasila sebagai dasar negara. Hal tersebut mencerminkan bahwa Indonesia adalah negara yang beragam dan merupakan perkumpulan dari berbagai suku, ras, dan agama.<sup>5</sup> Satu hal penting yang perlu diingat pendidikan di sekolah juga mengedepankan toleransi kepada sesama umat manusia apapun agamanya. Ini menandakan sebuah kesimpulan yang nyata yakni sekolah memiliki tujuan yang selaras dengan Ideologi Pancasila.

Sebuah temuan yang cukup mengerikan adalah adanya intoleransi dan munculnya bibit-bibit radikalisme yang sudah masuk dan berkembang di sekolah maupun madrasah. Hasil penelitian terbaru dari PPIM UIN Jakarta (2017) yang dilakukan terhadap siswa atau mahasiswa serta guru maupun dosen dari 34 provinsi di Indonesia. Di antara hasilnya yaitu sebanyak 34,3% responden memiliki opini intoleransi kepada kelompok agama lain selain Islam.<sup>6</sup>

Kemudian, ditambah lagi data yang cukup memprihatinkan sebanyak 48,95% responden siswa/mahasiswa merasa pendidikan agama mempengaruhi pemikiran mereka untuk tidak bergaul dengan pemeluk agama lain. Yang lebih mengagetkan lagi ada 58,55% responden mahasiswa/siswa memiliki pandangan keagamaan dengan opini yang radikal dan fanatik. Artinya ia hanya membenarkan apa yang ia pahami dan tidak sepakat dengan pemahaman lain. Tidak berhenti pada tahun 2017, PPIM UIN Jakarta kembali melakukan survey kepada Guru Sekolah dan Madrasah di Indonesia pada tahun 2018 yang didukung oleh UIN Imam Bonjol Padang, survei tersebut melibatkan 2.237 guru yang dijadikan sampel terdiri atas 1.811 guru sekolah dan 426 guru madrasah.

---

<sup>5</sup> H.A.R. Tilaar. 2007. *Mengindonesia Etnisitas dan Identitas Bangsa Indonesia: Tinjauan dari Perspektif Ilmu Pendidikan*. (Jakarta: PT Rineka Cipta), 181.

<sup>6</sup> PPIM UIN Jakarta, Redam Radikalisme Butuh Pendidikan Keagamaan Inklusif, [uinjkt.ac.id](http://uinjkt.ac.id), Rabu, 8 November 2017 (diakses 18 Oktober 2020)

Hasilnya juga cukup mencengangkan karena ternyata sebanyak 50,87% guru memiliki sikap yang radikal, dan 58% siswa memiliki sikap yang radikal.<sup>7</sup>

Sudah banyak kajian yang dilakukan oleh banyak lembaga-lembaga pendidikan terkait intoleransi, antikebinekaan dan bibit-bibit radikalisme yang mulai masuk ke lingkungan sekolah dan juga madrasah. Semua lembaga relatif sepakat jika radikalisme yang masuk ke sekolah melalui: aktivitas pembelajaran di kelas yang dipandu oleh guru, melalui buku pelajaran yang diduga memuat konten-konten yang berisi materi intoleransi, melalui pengaruh dan intervensi alumni dalam kegiatan kesiswaan yang dilakukan di sekolah maupun di luar sekolah dan kegiatan intra atau ekstrakurikuler seperti Rohani Islam (rohis) serta lemahnya kebijakan kepala sekolah/madrasah dalam mencegah masuknya pengaruh radikalisme.<sup>8</sup>

Peran guru sebagai ujung tombak pendidikan nasional memiliki posisi sentral dalam rangka “mencerdaskan kehidupan bangsa”, sebagaimana terkandung dalam Pembukaan UUD 1945. Artinya siapapun gurunya, apapun mata pelajaran yang diajarkannya dan jenjang sekolah dimana tempat ia mengajar, semestinya paham bahwa guru adalah insan pedagogis yang sedang melakukan tugas mulia sebagai aktivis kebangsaan yang sedang berlomba-lomba mencapai tujuan bernegara.

Tidak hanya itu guru juga merupakan seorang pendidik sekaligus pengajar, guru juga menjadi tokoh, panutan, dan identifikasi untuk para peserta didik, serta lingkungan di sekitarnya. Oleh karenanya guru mesti memiliki standar kualitas pribadi tertentu, yang mencakup tanggung jawab, kewibawaan, kemandirian, dan kedisiplinan dan mampu menjadi wadah yang tepat bagi pemikiran-pemikiran peserta didiknya.<sup>9</sup> Dan yang terpenting tugas adalah guru mampu meluruskan pandangan siswa yang dianggap keluar dari pedoman kebhinnekaan.

Tapi pada kenyataannya pernyataan tersebut diatas tidak berlaku secara menyeluruh. Ini disebabkan oleh guru-guru yang lupa terhadap fitroh utamanya ia mengajar. Ada oknum guru yang justru mengajarkan kepada siswa untuk

---

<sup>7</sup> PPIM UIN Jakarta, *Menyibak Intoleransi dan Radikalisme Guru*, uinjkt.ac.id, Jum'at, 19 Oktober 2018 (diakses 20 Desember 2020)

<sup>8</sup> Tsarina Maharani, *MAARIF INSTITUTE: Pintu Masuk Radikalisme di Sekolah*, news.detik.com, Jum'at, 26 Januari 2018 (diakses 18 Oktober 2020)

<sup>9</sup>E. Mulyasa, *Menjadi Guru Profesional; Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan* (Bandung: PT Remaja Posdakarya, 2008), 37.

membenci negara ini dengan segala konsensus dan simbol-simbol kebangsaan yang dimiliki negara Indonesia ini. Guru tersebut mengatakan kepada siswa bahwa Pancasila adalah thogut, UUD 1945 (dan segala perangkat hukum di bawahnya) adalah buatan manusia sehingga tak wajib dipatuhi, hormat kepada bendera merah putih adalah haram atau bid'ah. Jika sudah demikian lantas siapakah yang patut disalahkan dan sebenarnya siapa yang bertanggung jawab masalah semacam ini.

Permasalahan semacam ini sudah barang tentu tidak bisa dibiarkan apalagi didiamkan karena ini sangat bertolak belakang dengan Ideologi pancasila dan semboyan bhinneka tunggal ika yang menghargai perbedaan. Jika tidak cepat ditangani maka, bangsa Indonesia yang dikenal dengan sikap toleransinya yang tinggi kepada lambat laun akan memudar.

Ini menjadi persoalan sangat serius, jika benih radikalisme tersebut mulai tumbuh di sekolah maka yang terjadi adalah akan terjadinya kegagalan sistem pendidikan nasional kita yang dimana sebenarnya pemerintah sudah menggalakkan pendidikan karakter di sekolah. Jangan sampai pendidikan karakter dan narasi revolusi mental yang selama ini digaungkan, tinggal kata-kata dalam seminar semata. Tidak membumi di ruang-ruang kelas dan sekolah maupun madrasah, tidak juga membatin dalam pribadi siswa, guru dan pejabat negara.

Tak bisa dibayangkan jika hati dan isi kepala para generasi penerus ini hanya penuh dengan rasa kebencian, intoleran, anti-Pancasila dan antikebhinekaan. Makin berbahaya jika konteks pembelajaran di kelas oleh para guru memang melegitimasi dan memberikan ruang terhadap tindakan kekerasan, intoleransi, radikal dan eksklusivisme tersebut. Jika muatan pembelajaran yang disampaikan oleh guru di kelas cenderung bersifat radikal, mengarah kepada kekerasan, anti-Pancasila, NKRI dan kebhinekaan, maka sekolah/madrasah bisa bertindak tegas.

Sebagai langkah awal yang baik adalah, perlu kiranya pembuat kebijakan pendidikan bagi sekolah maupun madrasah (Kemendikbudristek dan Kemenag), mau dan mampu bersama-sama melakukan evaluasi dan supervisi yang menyeluruh yang bersifat berjenjang dan transparan. Sebab selama ini evaluasi oleh Kemendikbudristek dan Kemenag terhadap sekolah-sekolah, dilakukan hanya secara administratif belaka dan parsial.

Sebagai contoh yang selama ini berjalan adalah penilaian perangkat pembelajaran dan silabus yang dibuat oleh guru di sekolah/madrasah, itupun terkesan formalitas dan sekedar kewajiban administratif belaka. Pada kenyataannya di kelas guru bebas melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan perangkat. Walaupun sebenarnya ada pengawas sekolah, tidak dapat menjamin kegiatan penyebaran radikal siswa oleh oknum guru karena ketidak sempurnaan penilaian yang dilakukan dan terkesan mudah diada adakan oleh guru begitupun sebaliknya.

Instrumen yang efektif selain supervisi silabus dan perangkat pembelajaran, tentu perlu adanya ruang dialog terbuka antara guru, siswa dan orang tua sebagai bentuk pengawasan bersama. Ruang dialog mesti dibuka lebar oleh guru dalam pembelajaran di sekolah/madrasah. Diskursus wacana adalah keniscayaan antara siswa dan guru.

Kemudian yang tak kalah penting, guru harus berinisiatif meningkatkan kapasitas dirinya sendiri dengan memperbanyak bacaan dan wawasan, tentu bacaan apapun terkait penanggulangan pemikiran intoleran siswa. Karena potensi radikal siswa juga dapat bersumber dari apa yang siswa baca. Selain itu antara guru dan siswa juga dapat mengkaji dan mendiskusikan secara terbuka, rasional dan dialogis terkait buku yang dibaca. Ini yang agaknya kurang dalam diri para guru saat ini. Semoga menjadi bahan pertimbangan bagi kawan-kawan guru.<sup>10</sup>

Kesinambungan antara pendidik dan peserta didik sangat berpengaruh terhadap keberhasilan proses pembelajaran. Jika dalam hal ini berkaitan dengan radikalisme di sekolah / madrasah maka sudah barang tentu tidak hanya sekedar guru yang perlu dibimbing dengan benar tetapi juga pembinaan dan pengarahan kepada peserta didik perlu dilakukan. Mayoritas umat muslim di Indonesia mempunyai sikap maupun sifat yang toleran, penuh kasih sayang, dan cinta damai. Sedikit saja umat muslim yang radikal dan intoleran. Nonmuslim pun banyak yang radikal dan intoleran. Akan tetapi, bukan seberapa besar intoleransi umat muslim, tapi bahaya dampak pemikiran tersebut terhadap kedamaian, kerukunan, keamanan, dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini yang sangat perlu dijaga serta dipertahankan.

Presiden pertama Republik Indonesia, Ir. Soekarno mungkin sudah

---

<sup>10</sup> Satriawan Salim, "Guru dan Radikalisme di sekolah," *Indonesia.id*, Sabtu, 27 April 2019 (diakses 1 Agustus 2020)

menduga hal semacam ini akan terjadi. Di dalam pidatonya pada tanggal 28 Juli 1963 di Stadion gelora bung karno (GBK) soekarno mengatakan , “perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah, namun perjuangan kalian akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri”. Ucapan Soekarno 57 tahun silam seakan sedang terjadi di Indoonesia.

Pendidikan adalah salah satu elemen penentu maju tidaknya suatu bangsa. Dan salah satu tugas utama dari terselenggaranya pendidikan adalah mencegah penyebaran radikalisme dan dampak pemahaman keliru tersebut bagi perdamaian dan keamanan bangsa Indonesia ini. Paham keagamaan seseorang dipengaruhi oleh pendidikan formal dan nonformal. Dengan kata lain, paham keagamaan seseorang dipengaruhi oleh buku yang ia baca, guru Agama yang mengajarnya, pesantren jika ia merantau, dai, khatib, guru ngaji/ ustadz, dan internet. Masalahnya tidak semua hal ini membawa pesan kedamaian, kesejukan, kasih sayang, dan persatuan. Bahkan sebaliknya ia bisa menyulut perpecahan, tumpah darah, dan kebencian antar umat beragama, antar sesama warga Indonesia.

Selain buku mapel PAI, buku keagamaan lain juga mengandung muatan intoleransi dan radikalisme. Hal ini tentu sangat bertentangan dengan tujuan PAI, yaitu pembentukan karakter siswa yang saleh secara sosial dan spiritual. Artinya, PAI diharapkan melahirkan manusia yang bisa menerima perbedaan agama, suku, dan pilihan politik, sehingga tercipta kehidupan yang aman, tenteram, damai, dan harmonis. Buku keagamaan yang digunakan madrasah negeri dan swasta dinilai muatannya, baik yang diterbitkan pemerintah maupun swasta. Demikian juga muatan buku-buku keagamaan yang dijual di pasaran diperiksa secara berkala dan random sampling. Kecuali badan pemerintah, guru-guru di sekolah bisa memeriksa muatan buku agama yang dipakainya.

Dalam buku yang diterbitkan Maarif Institute, Menjaga Benteng Kebhinekaan di Sekolah, melihat ada tiga pintu utama bagaimana pemahaman radikal dan intoleransi melakukan penetrasi di lingkungan sekolah; pertama, kegiatan ekstrakurikuler. Kedua, peran guru dalam proses belajar mengajar. Ketiga, melalui kebijakan madrasah yang lemah dalam mengontrol masuknya radikalisme di sekolah.<sup>11</sup> Faktor dari luar (eksternal) lainnya adalah bagaimana saat ini pemahaman keagamaan sangat mudah di akses diberbagai media sosial

---

<sup>11</sup> Ahmad syafi'i maarif, *Islam dan pancasila sebagai dasar negara* (Jakarta: Mizan, 2017), 45.

seperti *Youtube, Instagram, Facebook*, dll. Di satu sisi memang baik adanya, namun tidak dapat dipungkiri bahwa banyak juga siswa yang akhirnya memiliki sikap radikal dari hanya belajar dari media sosial tanpa *tabayyun* terlebih dahulu kepada para ahli agama.

Mengatasi radikalisme agama di lingkup sekolah tidak bisa dilakukan oleh pemerintah sendiri dalam hal ini adalah Kementerian Agama. namun semua komponen bangsa harus saling mendukung dan bersinergi secara positif sehingga dapat melahirkan kualitas proses dan produk pendidikan sesuai yang dicita-citakan.<sup>12</sup>

Kementerian Agama Republik Indonesia membuat Keputusan Kementerian Agama (KMA No. 328 Tahun 2020) tentang kelompok Kerja Penguatan Program Moderasi Beragama pada kementerian Agama. Akan tetapi selama ini belum ada kepastian yang pasti terkait kegiatan-kegiatan apa saja dari pemerintah dalam menanggulangi radikalisme agama di lingkup madrasah maupun sekolah umum yang telah berkembang cukup mengkhawatirkan. Banyak hal-hal yang seharusnya di optimalkan kembali guna membrantas pergerakan radikalisme ini. Oleh karena itu peneliti tertarik meneliti sebuah lembaga yang mencanangkan penumbuhan sikap moderasi agama bagi guru agama. Kementerian Agama Kabupaten Banyumas lah yang menarik perhatian peneliti.

Berdasarkan wawancara awal peneliti dengan Kepala Kementerian Agama Kabupaten Banyumas, bahwa dalam menangani radikalisme keagamaan di lingkup pendidikan maka Kementerian Agama melakukan pembinaan-pembinaan khusus kepada guru Pendidikan Agama Islam (PAI). Tidak hanya itu, Kementerian Agama juga menyusun buku putih/buku saku Moderasi beragama yang berisi konten – konten yang berisi tentang panduan dalam menghadapi berbagai cara pandang keagamaan yang beragam dan tentu sarannya adalah para pelaku pendidikan di bawah Kemenag, dosen, guru, ustadz, dan mahasiswa dan juga siswa. Evaluasi-evaluasi pendidikan agama di sekolah juga harus selalu dilakukan secara berkala agar pendidikan yang dijalankan bisa terlihat hasilnya dan tentu masih banyak program-program lain yang dilaksanakan guna menangkal permasalahan semacam ini.

---

<sup>12</sup> M. Ngalim Purwanto, *Ilmu pendidikan Teoritis dan Praktis*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995), 15

Alasan mengapa peneliti tertarik meneliti di Kementerian Agama Kabupaten Banyumas adalah karena problematika moderasi beragama yang berkembang di lingkup pendidikan harus langsung ditangani oleh lembaga keagamaan yang dalam hal ini adalah Kementerian Agama Kabupaten Banyumas. Selanjutnya, alasan peneliti memilih Kementerian Agama Kabupaten Banyumas karena dilihat dari tugas dan fungsinya memiliki peran yang cukup berpengaruh terhadap implementasi moderasi beragama. Kemudian yang tidak kalah penting adalah peneliti melihat bahwa sekolah-sekolah yang dinaungi Kementerian Agama Kabupaten Banyumas memiliki sikap moderasi beragama yang baik daripada di Kabupaten lain. Menurut informasi yang diperoleh peneliti melalui wawancara dengan Kasi Pendidikan Agama Islam bahwa di lingkup sekolah di Banyumas ada guru maupun siswanya pernah terkapar paham radikalisme. Namun berkat program-program yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama Kabupaten Banyumas dalam menggaungkan moderasi beragama, maka sedikit demi sedikit paham radikal mulai memudar.<sup>13</sup> Kemudian juga ada sekolah - sekolah di Banyumas yang teridentifikasi bibit - bibit radikalisme bahkan sudah sampai ditahap diketahui *by name* maupun *by dress* oleh pihak Intelegen.<sup>14</sup> Dari sinilah peneliti akhirnya tumbuh rasa penasaran apa dan bagaimana upaya yang dilakukan Kementerian Agama Kabupaten Banyumas membina, mendidik, mengarahkan, dan juga mengawasi segala problem keagamaan di lingkungan sekolah sehingga terbentuknya sikap moderasi beragama yang baik.

## **B. Batasan dan Rumusan Masalah**

Penelitian yang berjudul “Implementasi Program Moderasi Beragama di Kementerian Agama Kabupaten Banyumas pada Lingkungan Sekolah” ini mempunyai batasan masalah agar lebih fokus dan terperinci. Peneliti memberi batasan yaitu Pembinaan yang diberikan Kementerian Agama kepada guru Agama untuk mengimplementasi sikap moderasi beragama kepada siswa dan juga sikap Kementerian Agama Kabupaten Banyumas dalam menjembatani paham keagamaan yang beragama di dalam diri siswa sehingga tidak

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan Bapak Edi Sungkowo (Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Banyumas)

<sup>14</sup> Wawancara dengan Bapak Akhsin Aedi (Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas)

memunculkan konflik tetapi yang diharapkan adalah dapat membentuk sikap toleran antar sesama umat muslim.

Penelitian ini juga mempunyai rumusan masalah, yaitu “Bagaimana Implementasi Program Moderasi Beragama di Kementerian Kabupaten Banyumas pada Lingkungan Sekolah?”

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Program Moderasi Beragama di Kementerian Agama Kabupaten Banyumas pada Lingkungan Sekolah.

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain sebagai berikut:

#### **1. Secara Teoritis**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam mengembangkan teori – teori yang berhubungan dengan pembinaan untuk mengimplementasi sikap moderasi beragama melalui pendidikan bagi guru maupun siswa di lingkungan sekolah.

#### **2. Secara Praktis**

- a. Memberikan sumbangan pemikiran dan masukan bagi Kementerian Agama kabupaten Banyumas dalam memberikan pembinaan moderasi beragama kepada guru Agama di lingkup madrasah maupun di sekolah umum.
- b. Meningkatkan kualitas pembinaan bagi guru agama madrasah dan sekolah umum dengan tujuan mengimplementasi sikap moderasi beragama melalui pendidikan
- c. Memberikan bahan kajian atau pemikiran lebih lanjut dan pengambilan kebijakan

### **E. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan pembaca memahami tesis ini, maka peneliti akan membaginya ke dalam beberapa bagian, yaitu bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir.

Bagian awal tesis ini akan meliputi cover judul, pengesahan direktur pascasarjana, pengesahan tim penguji, nota dinas pembimbing, pernyataan keaslian, abstrak (Bahasa Indonesia), abstrak (Bahasa Inggris), transliterasi, motto, persembahan, kata pengantar, dan daftar isi.

Bagian tesis ini memuat pokok – pokok permasalahan yang terjadi dari:

1. Bab pertama, pendahuluan yang meliputi: latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.
2. Bab kedua, kajian teoritik yang berisi dari berbagai literature tentang pembinaan, kompetensi guru, dan sebagainya yang terkait.

Dalam bab ini dibahas tentang konsep teori yang terdiri dari: Pengertian Peran, Kementerian Agama yang meliputi; pengertian Kementerian Agama itu sendiri, struktur Kementerian Agama Banyumas, bidang yang dinaungi Kementerian Agama Banyumas, kegiatan, visi dan misi, serta tujuan Kementerian Agama secara umum. Selanjutnya adalah tentang hubungan Kemenag dengan sekolah umum, meliputi pembahasan terkait sekolah di Indonesia dan perkembangannya Serta pengertian moderasi beragama itu sendiri.

3. Bab ketiga adalah metode penelitian yang meliputi; paradigma penelitian, pendekatan penelitian dan jenis penelitian, variabel penelitian, data dan sumber data, tempat dan waktu penelitian, metode pengumpulan data, serta teknik analisis data yang digunakan.
4. Bab keempat adalah pembahasan tentang Kementerian Agama kabupaten Banyumas yang meliputi; Deskripsi atau gambaran tentang Kementerian Agama kabupaten Banyumas, Visi Misi serta tujuan Kementerian Agama kabupaten Banyumas, tugas dan fungsi Kementerian Agama Kabupaten Banyumas, Struktur kepengurusan Kementerian Agama kabupaten Banyumas, dan hasil dari penelitian yaitu peran Kementerian Agama kabupaten Banyumas dalam pengimplementasian sikap moderasi beragama bagi guru agama di sekolah.

Berdasarkan variabel yang sudah dipaparkan di atas, selanjutnya akan membahas terkait pembinaan serta kegiatan – kegiatan yang diberikan Kementerian Agama kabupaten Banyumas untuk mengimplementasi sikap moderasi guru agama.

5. Bab kelima yaitu penutup yang mengemukakan kesimpulan dan saran.
6. Bagian akhir dari tesis ini akan menampilkan daftar pustaka, lampiran – lampiran, SK Pembimbing, serta daftar riwayat hidup peneliti.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan peneliti dapat disimpulkan bahwa Kementerian Agama Kabupaten Banyumas mengimplementasikan program moderasi beragama di lingkungan sekolah melalui sebagai Pembina Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah, sebagai Pembina Ekstrakurikuler Keagamaan di sekolah, sebagai Pengampu Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah, dan sebagai Pengawas Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah. Dalam pelaksanaan program moderasi beragama di sekolah Kementerian Agama Kabupaten Banyumas juga bekerja sama dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Banyumas.

Setiap penelitian tentunya tidak sempurna, begitu juga penelitian tentang Implementasi Program Moderasi Beragama Kementerian Agama Kabupaten Banyumas di Lingkungan Sekolah ini memiliki kelemahan, di mana ada beberapa ruang lingkup yang tidak bisa dicapai oleh peneliti. Salah satunya peneliti tidak menjangkau secara langsung pelaksanaan pembinaan dari Kementerian Agama Kabupaten Banyumas baik diklat, *workshop*, maupun pembinaan lainnya, dikarenakan penelitian yang dilakukan tidak bertepatan dengan acara pembinaan maupun penyuluhan guru PAI di Sekolah.

#### **B. Saran**

Pembinaan – pembinaan yang diberikan oleh Kementerian Agama Kabupaten Banyumas berupa program - program khusus maupun program kerjasama dalam pengimplementasian program moderasi beragama di sekolah sudah sangat baik dan sangat bermanfaat bagi sekolah. Tetapi peneliti juga perlu memberikan saran. Saran yang bisa peneliti berikan antara lain ialah:

1. Kementerian Agama Kabupaten Banyumas harus selalu meningkatkan upaya - upaya kegiatan, pembinaan formal maupun non formal, pelatihan kepada guru PAI di sekolah agar kompetensi yang dimiliki dapat dijalankan dengan baik
2. Jumlah sumber daya manusia (SDM) terutama pengawas PAI di Sekolah Dasar (SD) diperbanyak sehingga pengawasan terhadap sekolah - sekolah bisa dijalankan dengan maksimal

3. Program kegiatan berupa pembinaan, workshop, dan diklat hendaknya dilaksanakan di luar jam mengajar agar pembelajaran di sekolah tetap bisa dilaksanakan oleh siswa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdallah. “Radikalisme dan Quo Vadis Pendidikan Agama”, dalam <http://mediaindonesia.com/.../163363-radikalisme-dan-quo-vadi...>, (diakses 2 Agustus 2020)
- Abdullah Idi. *Sosiologi Pendidikan (Individu, Masyarakat dan Pendidikan)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011
- Adz-Dzaky, Hamdani Bakran. *Konseling dan Psikoterapi Islam*, Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002
- Agustino, Leo. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta, 2006.
- Akhwan, Muzhoffar “Pengembangan Madrasah sebagai Pendidikan untuk Semua”, *El-Tarbawj 1*, no. 1, (2008): 41-42
- Alwi, Hasan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2000
- Betria Zarpina Yanti, Doli Witro, *ISLAMIC MODERATION AS A RESOLUTION OF DIFFERENT CONFLICTS OF RELIGION*, (Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan, Vol. 8, No. 1, Juni 2020), 449
- Creswell, John W. *Reseach Design; Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013
- Danisoworo, *Pengertian Revitalisasi*. Jakarta: Erlangga, 2002
- Departemen Agama RI, Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahannya dengan transliterasi. Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2008
- \_\_\_\_\_. *Profesionalisme Pelaksanaan Pengawas Pendidais*, Jakarta: Dirjen Bina Bangsa Islam, 2003
- Departemen Pendidikan Indonesia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2008
- Darlis. Mengusung Moderasi Islam di Tengah Masyarakat Multikultural. *Rausyan Fikr*, Vol.13 No. 2 Desember 2017, 225-255
- Desmita. *Psikologi Perkembangan Peserta Didik*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2009
- Friedman, Marilyn M. (1992). *Family Nursing. Theory & Practice*. 3/E. Debora Ina R.L. (1998) ( alih bahasa ). Jakarta: EGC
- Fahrudin. *Pentingnya Moderasi Beragama bagi Penyuluh Agama*. Jakarta: Republika, 2019
- Faris, Ahmad Ibnu. *Mu’jam Maqayis al-Lughah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1979
- Ghony, Djunaidi dan Almansur, Fauzan *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2017
- H.A.R. Tilaar. “Mengindonesia Etnisitas dan Identitas Bangsa Indonesia: Tinjauan dari Perspektif Ilmu Pendidikan”. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007
- Hajaroh, Mami “Paradigma, Pendekatan dan Metode Penelitian Fenomenologi”, Program Studi Kebijakan Pendidikan FIP UNY
- Hamami, Tasman “Pendidikan Agama Islam di Sekolah Umum sebagai Keharusan Sejarah”, *Jurnal Pendidikan Agama Islam vol 1*, no. 2 (2004): 186

- Hiqmatunnisa, Harin dan Ashif Az-Zafi, “Penerapan Nilai-nilai Moderasi Islam dalam Pembelajaran Fiqih Di PTKIN menggunakan Konsep Problem Based Learn”, *Jurnal JIPIS*, Vol.29, No. 1 (April 2020), 29
- Iskandar. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*. Jakarta: Gaung Persada Press, 2008
- Koesmarwanti, Nugroho Widiyantoro, *Dakwah Sekolah Era Baru*, Solo: Era Inter Media, 2000
- Kosim, Mohammad “Guru dalam Perspektif Islam”, *Tadris* 3, no. 1 (2008): 46
- Kurniawan, Andy. “Buku PAI Bermuatan Radikal Ditemukan di SMAN 1 Karanganyar”, dalam <http://news.metrotvnews.com/.../buku-pai-bermuatan-radikal-di...>, (diakses tanggal 1 Agustus 2020)
- Maarif, Ahmad Syafii Maarif. *Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita*. Jakarta: Yayasan Abad Demokrasi, 2012
- Mansur, *Strategi Komunikasi Kerohanian Islam (Rohis) dalam Meningkatkan Rekrutmen di SMA Negeri 4 Kendari*, *Journal IAIN Kediri* Vol. 10 No.2 November 2017
- Masdar, Hilmy. *Anak Muda di Tengah Pusaran Radikalisme*, Surabaya: Koleksi Digital UIN Sunan Ampel, 2016
- Miles, Matthew and Huberman, Michael. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia UI-Press, 1992
- Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Posdakarya, 2010
- Mulyadi, Deddy. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik (Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik)*. Bandung: Alfabeta, 2015
- Murtadlo, M. *Seminari dan Pengembangan Moderasi Beragama: Kajian terhadap Seminari Al Kitab Asia Tenggara (SAAT) Malang*. Jakarta: Puslitbang Penda, 2019
- Na'im, Akhsan. *Kewarganegaraan, Suku Bangsa, Agama, dan Bahasa sehari - hari Penduduk Indonesia*, Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2010
- Nababan, Yohanes R “Pengaruh Pendidikan dan Pelatihan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan PT. PLN (Persero) Area Manado”, *Jurnal Emba*, Vol. 4, No. 3 (2016)
- Nitisemito, Alex. *Manajemen Personalia*. Cetakan X. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2007
- Patilima, Hamid. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung, Alfabeta, 2011
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 90 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah pasal 1 ayat 2
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama Pasal 2
- Purwanto dan Sulistyastuti, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara, 1991
- Raditya, Iswara N “Sejarah Lahirnya Kementerian Agama RI yang Sempat Tak Ditetujui”, *Tirto.id*, Rabu, 16 Januari 2019 (diakses 16 Juli 2019)
- Ridwan, Nasir. “Mencari Tipologi Format Pendidikan Ideal, Pondok Pesantren di engah Arus Perubahan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005
- Sari, Aulia Permata. “Komunikasi Organisasi dalam Penerapan Nilai Budaya Kerja pada Pelayanan Haji di Kantor Kemenerian Agama Kota Pekanbaru”, *Jom FISIP* vol. 5 no. 1 (2018): 8

Satriawan Salim, "Guru dan Radikalisme di sekolah," *Indonesia.id*, Sabtu, 27 April 2019 (diakses 1 Agustus 2020)

Satria, Ase "Definisi Peran Dan Pengelompokan Peran Menurut Para Ahli" (diakses 20 september 2019)

Schwartz, S. *Dua wajah Islam: moderatisme vs fundamentalisme dalam wacana global*. Jakarta: Belantika, 2007

Soehadha, Moh. *Metode Penelitian Sosial Kualitatif untuk Studi Agama*. Yogyakarta: SUKA-Press, 2012

Solahudin, "Peran Strategis Madrasah Swasta di Indonesia", *Jurnal Kependidikan* 6, no. 1 (2018): 94

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2010

\_\_\_\_\_. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016

Suharto, Toto. "Indonesianisasi Islam: Penguatan Islam Moderat dalam Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia, Al-Tahrir", *Jurnal Pemikiran Islam*, Vol.17, No.1 (2017), 168

Suryana, "Metodologi Penelitian; Model Praktis Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif", Universitas Pendidikan Indonesia, 2010

Sutrisno,Edy. "Aktualisasi Moderasi Beragama di Lembaga Pendidikan, Jurnal Bimas Islam Vol 12 No. 1 (2019): 341.

Thoha, M. *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*, Jakarta: Grafindo Persada, 2003.

Undang – Undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 1 ayat 1

Vetzhal Rifai, *Managemen sumber daya manusia untuk perusahaan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

Wikipedia, "Pengertian Madrasah Aliyah", *Wikipedia*. 2012, 1 (diakses 16 Juli 2019)

Yanti, Betria Zarpina, Doli Witro, *ISLAMIC MODERATION AS A RESOLUTION OF DIFFERENT CONFLICTS OF RELIGION*, Andragogi: *Jurnal Diklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan*, Vol. 8, No. 1, Juni 2020), 449

Zat. "Hasil Survei Kerukunan Umat Beragama Tahun 2017 Menunjukkan Adanya Penurunan, Tapi Masih Aman", dalam <http://www.iain-surakarta.ac.id/?p=12032>, (diakses 1 Agustus 2020)

Zuly Qodir, 'Perspektif Sosiologi tentang Radikalisasi Agama Kaum Muda', *Maarif*, 8(1) 2013, 45